

KHILAFAHISME, GLOBALISASI, DAN KRISIS KEBERAGAMAN: PENDIDIKAN ISLAM MULTIKULTURAL SEBAGAI SOLUSI KONTEKSTUAL

Abdulloh, Mudhofar

Univesitas Al-Qolam Malang, East Java, Indonesia
abdulloh@alqolam.ac.id, mudhofar@alqolam.ac.id

ABSTRACT:

Globalization not only expands cultural and intellectual connectivity but also brings the threat of value homogenization, which erodes local identities and religious pluralism. In Indonesia, one of the serious implications is the growing influence of khilafahism a transnational ideology that rejects democracy and cultural diversity. This ideology has gained traction through digital platforms and informal education and is increasingly accepted among the younger generation. This phenomenon indicates a crisis of diversity and a disorientation of social and religious identity.

This article employs a descriptive qualitative approach through library research to analyze the relationship between globalization, the spread of khilafahism, and the crisis of diversity, while also exploring the potential of multicultural Islamic education as a contextual solution. Grounded in Islamic values and the framework of maqāṣid al-sharī'ah, multicultural Islamic education is seen as capable of instilling tolerance, inclusivity, and respect for differences. Findings indicate that the implementation of this educational model in several Islamic institutions has proven effective in shaping students' character to be moderate and open to diversity.

Keywords:

Khilafahism, Globalization, Diversity Crisis, Multicultural Islamic Education, Religious Moderation

PENDAHULUAN/INTRODUCTION

Globalisasi merupakan ciri khas utama zaman modern yang memengaruhi berbagai dimensi kehidupan manusia, termasuk aspek identitas budaya dan keberagaman. Salah satu konsekuensi yang menonjol dari proses ini adalah kecenderungan menuju homogenisasi nilai, yakni penyatuan cara pandang, budaya, dan gaya hidup yang didominasi oleh nilai-nilai Barat. Kondisi ini berpotensi menggerus keragaman budaya lokal dan melemahkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi masuknya ideologi transnasional.¹ Di tengah realitas kemajemukan Indonesia, situasi semacam ini menimbulkan tantangan signifikan bagi stabilitas sosial serta menggerus semangat kebangsaan yang inklusif.

Khilafahisme merupakan salah satu bentuk ideologi transnasional yang paling menonjol dalam dua dekade terakhir. Ideologi ini menolak keberadaan negara-bangsa (nation-state) dan mengusung gagasan pembentukan pemerintahan tunggal berskala global yang didasarkan pada interpretasi eksklusif terhadap syariat Islam. Narasi mengenai khilafah tidak lagi terbatas pada diskursus kalangan elite, melainkan telah menyebar ke ranah publik, seperti media sosial, kelompok-kelompok dakwah, hingga institusi pendidikan formal. Dalam kajiannya, Noorhaidi Hasan mengungkapkan bahwa paham ini cenderung menarik perhatian generasi muda yang diliputi kegelisahan atas krisis moral dan ketimpangan sosial, serta

¹ Roland Robertson, *Globalization: Social Theory and Global Culture* (London: Sage Publications, 1992), 87.

menunjukkan religiusitas yang tumbuh, namun kurang inklusif dan cenderung rigid.² Temuan dari laporan PPIM UIN Jakarta menunjukkan bahwa sekitar 23% pelajar menyatakan kesiapan mereka untuk mendukung penerapan sistem khilafah apabila sistem tersebut dipandang mampu memberikan jawaban atas berbagai permasalahan bangsa.³

Meningkatnya pengaruh khilafahisme mencerminkan adanya krisis dalam pengelolaan keberagaman, ditandai oleh menurunnya kapasitas sebagian warga negara dalam menerima dan mengelola perbedaan sebagai realitas sosial yang tak terhindarkan. Kondisi ini menjadi ancaman nyata bagi fondasi kebangsaan Indonesia yang bertumpu pada prinsip toleransi dan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*. Dalam konteks tersebut, pendidikan Islam multikultural hadir sebagai pendekatan yang relevan dan transformatif. Pendidikan Islam tidak seharusnya hanya berfungsi sebagai wahana penguatan doktrin, melainkan perlu diarahkan menjadi instrumen pembentukan karakter yang inklusif dan mampu menumbuhkan penghargaan terhadap pluralitas.⁴

Pendidikan Islam multikultural berpijak pada keyakinan bahwa ajaran-ajaran pokok Islam seperti keadilan (*al-'adl*), toleransi (*tasāmuh*), dan kasih sayang (*rahmah*) memiliki kesesuaian yang erat dengan prinsip-prinsip multikulturalisme kontemporer. Pendekatan pendidikan ini bertujuan membentuk peserta didik yang tidak hanya saleh dalam aspek ibadah, tetapi juga memiliki kearifan sosial dalam menyikapi keberagaman serta daya tahan terhadap pengaruh radikalisme yang menyimpang⁵. Oleh karena itu, mengarusutamakan pendidikan Islam multikultural menjadi sebuah keharusan dalam menyikapi tantangan globalisasi dan krisis keberagaman di Indonesia.

METODE/METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pemilihan metode ini dimaksudkan untuk menelaah secara mendalam berbagai referensi yang membahas isu khilafahisme, globalisasi, serta pendidikan Islam multikultural dalam kaitannya dengan problematika keberagaman di Indonesia. Pendekatan ini dinilai tepat karena memberikan ruang bagi peneliti untuk mengkaji secara kritis dan kontekstual berbagai pemikiran, konsep, serta diskursus pendidikan yang termuat dalam literatur akademik maupun dokumen keagamaan.⁶

Data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber literatur primer dan sekunder, termasuk buku-buku akademik, artikel jurnal bereputasi nasional dan internasional (terindeks SINTA maupun

² Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad: Islam, Militancy, and the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia* (Ithaca: Cornell Southeast Asia Program, 2006), 179

³ Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta, *Potret Keberagaman Pelajar dan Radikalisme* (Jakarta: PPIM Press, 2022), 23

⁴ Azyumardi Azra, *Islam Substantif: Agar Umat Tidak Jadi Buih* (Bandung: Mizan, 2000), 144–146

⁵ Choirul Mahfud, "Islamic Multicultural Education in Indonesia: Theoretical Framework and Practices," *Journal of Social Studies Education Research* 10, no. 2 (2019): 84

⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 6

Scopus), dokumen kebijakan di bidang pendidikan, serta hasil kajian dari lembaga-lembaga seperti PPIM UIN Jakarta, BNPT, dan Setara Institute. Selain itu, laporan empirik mengenai penerapan pendidikan Islam yang inklusif di lingkungan pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi Islam juga menjadi rujukan penting. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan relevansi tema, kredibilitas penulis, serta aktualitas informasi yang disajikan.⁷

Penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) sebagaimana dirumuskan oleh Klaus Krippendorff. Teknik ini digunakan untuk menggali struktur makna, pola argumentatif, serta kecenderungan nilai yang terkandung dalam berbagai teks atau dokumen yang dianalisis.⁸ Prosedur analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi tema-tema utama, kategorisasi isu-isu yang relevan, penafsiran makna yang terkandung dalam teks, serta penempatan hasil analisis dalam konteks realitas sosial dan budaya masyarakat Indonesia.

Guna menjamin validitas data dan meningkatkan objektivitas dalam proses analisis, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi baik dari segi sumber maupun sudut pandang. Pendekatan ini dilakukan dengan cara membandingkan serta mensintesis temuan yang berasal dari berbagai literatur lintas disiplin, seperti pendidikan, sosiologi, teologi Islam, dan studi politik. Strategi ini bertujuan mengintegrasikan data yang bersifat tekstual dan kontekstual, sekaligus meminimalkan potensi bias dalam penafsiran.⁹ Dasar epistemologis dalam penelitian ini mengacu pada pendekatan integratif-interkoneksi sebagaimana dikembangkan oleh M. Amin Abdullah. Pendekatan ini menggabungkan perspektif normatif-teologis dengan pandangan sosiologis dan humanistik, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih utuh terhadap hubungan antara teks-teks keislaman dan realitas sosial dalam masyarakat yang pluralistik.¹⁰ Dengan demikian, pendekatan metodologis ini memberikan landasan yang kokoh untuk menganalisis bagaimana pendidikan Islam multikultural merespons tantangan ideologi yang eksklusif serta meredam krisis toleransi dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN/RESULT AND DISCUSSION

1. Globalisasi dan Penyeragaman Nilai

Globalisasi adalah suatu proses multidimensional yang menghubungkan berbagai aspek kehidupan lintas batas negara, termasuk dalam ranah budaya dan pendidikan. Dalam konteks budaya, globalisasi ditandai oleh derasnya arus informasi, pertukaran budaya antarnegara, serta penyebaran nilai-nilai global yang kerap menggeser identitas lokal. Sementara itu, dalam sektor pendidikan, globalisasi tercermin melalui penerapan kurikulum berstandar internasional, pemanfaatan teknologi

⁷ Zed, M., *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3

⁸ Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (Thousand Oaks: SAGE, 2004), hlm. 18

⁹ John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 3rd ed. (Los Angeles: SAGE, 2013), hlm. 251

¹⁰ M. Amin Abdullah, *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 202

digital lintas negara, serta adopsi metode pembelajaran yang bersumber dari praktik-praktik global.¹¹ Akan tetapi, di balik derasnya arus keterbukaan yang ditawarkan globalisasi, terdapat dampak berupa homogenisasi nilai, yakni proses penyeragaman norma, pola perilaku, dan orientasi hidup yang didominasi oleh budaya global yang hegemonik.

Salah satu kerangka teori kritis yang relevan untuk memahami gejala ini adalah konsep *Cultural Imperialism* yang diperkenalkan oleh Herbert I. Schiller. Melalui karyanya *Communication and Cultural Domination* (1976), Schiller mengemukakan bahwa penetrasi budaya global merupakan bagian dari strategi dominasi ideologis negara-negara Barat—terutama Amerika Serikat—yang bertujuan membentuk pola pikir dan gaya hidup masyarakat dunia agar sejalan dengan nilai-nilai kapitalisme, individualisme, dan sekularisme.¹² Nilai-nilai tersebut meresap secara halus ke dalam kehidupan masyarakat lokal melalui saluran media massa, industri hiburan, dan sistem pendidikan, sebagai bentuk *soft power* yang secara perlahan mengikis kekuatan identitas budaya dan keagamaan yang telah mengakar..

Proses homogenisasi nilai membawa dampak signifikan terhadap identitas lokal dan keberagaman budaya suatu bangsa. Nilai-nilai global yang diadopsi secara tidak kritis kerap kali bertentangan dengan prinsip kearifan lokal maupun ajaran keagamaan. Contohnya, masuknya budaya konsumtif, kebebasan individu yang tidak terbatas, serta paham relativisme moral dapat menggerus semangat gotong royong, kedalaman spiritual, dan loyalitas terhadap identitas kebangsaan.¹³ Dalam jangka panjang, situasi semacam ini berpotensi menimbulkan krisis identitas, khususnya di kalangan generasi muda yang tengah berada di persimpangan antara tekanan arus globalisasi dan keterikatan terhadap budaya asalnya..

Selain itu, infiltrasi ideologi luar mulai merambah sektor pendidikan di Indonesia. Laporan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tahun 2023 mengindikasikan adanya peningkatan penyebaran paham radikal transnasional—termasuk khilafahisme—di lingkungan pelajar dan mahasiswa, yang berlangsung melalui forum kajian keagamaan tertutup maupun saluran digital.¹⁴ Temuan ini sejalan dengan hasil riset PPIM UIN Jakarta (2022) yang mengungkap bahwa satu dari empat pelajar meyakini sistem khilafah sebagai bentuk pemerintahan yang lebih ideal bagi umat Islam dibandingkan sistem demokrasi yang berlaku saat ini.¹⁵ Realitas tersebut menunjukkan bahwa arus globalisasi nilai tidak semata menghadirkan budaya populer, tetapi juga menciptakan celah bagi masuknya ideologi-ideologi eksklusif yang berpotensi mengganggu keberagaman sosial.

¹¹ Joel Spring, *Globalization of Education: An Introduction* (New York: Routledge, 2009), 23

¹² Herbert I. Schiller, *Communication and Cultural Domination* (New York: M.E. Sharpe, 1976), 9

¹³ Ariel Heryanto, *Popular Culture in Indonesia: Fluid Identities in Post-Authoritarian Politics* (London: Routledge, 2008), 45

¹⁴ Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), *Laporan Tahunan Pencegahan Paham Radikal di Lingkungan Pendidikan* (Jakarta: BNPT, 2023), 17

¹⁵ Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta, *Potret Keberagaman Pelajar dan Radikalisme* (Jakarta: PPIM Press, 2022), 23

Dalam kerangka ini, globalisasi tidak hanya membawa peluang, tetapi juga menghadirkan tantangan serius bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi pendidikan yang selektif dalam menyerap nilai-nilai global, agar tidak merusak integritas budaya lokal maupun kohesi sosial. Salah satu pendekatan yang relevan adalah pendidikan Islam multikultural, yang tidak hanya menumbuhkan kesadaran kritis terhadap dampak globalisasi, tetapi juga memperkuat identitas kebangsaan yang bersifat moderat dan inklusif.

2. Khilafahisme sebagai Ancaman Inklusivitas

Gerakan khilafahisme di Indonesia bukanlah fenomena yang tiba-tiba muncul, melainkan bagian dari rangkaian panjang perkembangan ideologi transnasional yang telah memasuki wilayah Nusantara sejak awal abad ke-20. Akar sejarahnya dapat dilacak dari berdirinya Hizbut Tahrir di Yordania pada tahun 1953, yang kemudian meluaskan pengaruhnya ke berbagai negara, termasuk Indonesia pada dekade 1980-an. Di Indonesia, Hizbut Tahrir mulai menampakkan aktivitas secara terbuka pada awal 2000-an, dengan fokus pada kelompok intelektual muda seperti mahasiswa dan pelajar melalui forum kajian keislaman, diskusi publik, serta pemanfaatan media sosial.¹⁶ Kendati secara resmi telah dibubarkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2017, semangat dan wacana khilafahisme masih terus tersebar melalui berbagai saluran informal dan jejaring digital.

Dari sisi ideologi, khilafahisme mengusung pandangan yang eksklusif, dengan menolak keberagaman budaya serta menolak keberadaan negara-bangsa (nation-state) sebagai bentuk pemerintahan yang sah. Ideologi ini mengklaim otoritas tunggal atas interpretasi syariah dan menganggap sistem demokrasi sebagai bentuk kekufuran yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Dalam berbagai narasinya, khilafahisme cenderung memandang budaya lokal sebagai warisan jahiliyah yang harus dihapus (dinaskh), dan digantikan dengan simbol-simbol syariat serta struktur kekuasaan tunggal model khilafah.¹⁷ Konsep ini tentu bertentangan dengan semangat Islam Nusantara yang memadukan nilai Islam dengan kearifan lokal dalam kerangka kebangsaan Indonesia.

Kajian terhadap ideologi khilafahisme mengungkap adanya konflik antara semangat puritanisme ideologis dengan prinsip inklusivitas yang menjunjung keberagaman. Dalam berbagai publikasi resmi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan kelompok sejenis, Indonesia kerap diposisikan sebagai korban dari sistem sekuler, sementara umat Islam dinilai belum menjalankan Islam secara menyeluruh (kaffah) selama masih menerima sistem demokrasi dan ideologi Pancasila sebagai dasar bernegara.¹⁸ Sikap ini menutup ruang dialog dan menafikan keragaman ekspresi keislaman yang telah lama tumbuh dalam masyarakat Indonesia.

¹⁶ Noorhaidi Hasan, *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East: Trajectories of Global Islamism* (Singapore: NUS Press, 2018), 135

¹⁷ H. F. Zarkasyi, *Gerakan Islam Transnasional dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: Center for the Study of Islam and Democracy [CIDES], 2013), 42

¹⁸ Hizbut Tahrir Indonesia, *Khilafah: Sistem Pemerintahan Islam* (Jakarta: HTI Press, 2013), 25

Kekhawatiran terhadap tumbuhnya afiliasi terhadap ideologi transnasional seperti khilafahisme semakin beralasan, seiring munculnya data survei yang memperlihatkan tren peningkatan dukungan, khususnya di kalangan generasi muda terdidik. Hasil survei yang dilakukan oleh PPIM UIN Jakarta tahun 2022 menunjukkan bahwa sebanyak 23,4% siswa SMA menyatakan dukungannya terhadap penerapan sistem khilafah, sedangkan 28,7% lainnya memandang bahwa demokrasi bukanlah sistem yang ideal bagi umat Islam.¹⁹ Fenomena ini mencerminkan adanya krisis literasi ideologi kebangsaan dan lemahnya penguatan nilai Islam moderat di lembaga pendidikan.

Lebih dalam, paham khilafahisme secara prinsipil bertolak belakang dengan fondasi ideologis Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang tercermin dalam Pancasila, UUD 1945, serta semangat nasionalisme yang menjunjung tinggi keberagaman. Dari sisi teologi Islam, pandangan eksklusif tersebut tidak selaras dengan esensi Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin, yang mengedepankan nilai-nilai kasih sayang universal, penghormatan terhadap hak-hak sesama manusia, serta tegaknya keadilan sosial dalam kehidupan bersama.²⁰ Islam tidak menetapkan satu sistem pemerintahan tunggal yang baku, tetapi memberi ruang ijtihad kontekstual sesuai kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, penyebaran paham khilafahisme menjadi ancaman serius terhadap inklusivitas pendidikan dan kohesi sosial. Jika tidak direspons dengan pendekatan yang tepat—terutama melalui pendidikan Islam yang multikultural dan berwawasan kebangsaan—maka ruang dialog akan tergerus, dan eksklusivisme akan semakin mencengkeram generasi muda.

3. Krisis Keberagaman dan Fragmentasi Sosial

Di tengah kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi, Indonesia justru menghadapi fenomena krisis keberagaman yang ditandai oleh meningkatnya polarisasi sosial dan konflik berbasis agama. Kasus-kasus intoleransi seperti penolakan pendirian rumah ibadah, kriminalisasi terhadap minoritas keyakinan, serta penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial memperlihatkan bahwa fondasi keberagaman bangsa ini tengah tergerus oleh narasi identitas eksklusif.²¹ Polarisasi ini bukan hanya berdampak pada masyarakat secara horizontal, tetapi juga masuk ke institusi pendidikan dan komunitas keagamaan, memperkuat segregasi sosial di level akar rumput.

Salah satu penyebab utama dari krisis ini adalah minimnya pendekatan kurikulum dan pedagogi yang menginternalisasikan nilai-nilai hidup multikultural (*living values education*). Pendidikan agama di sekolah dan madrasah sering kali terjebak dalam pendekatan dogmatik yang kurang membuka ruang bagi dialog lintas perbedaan. Dalam banyak kasus, buku ajar agama Islam lebih menekankan ortodoksi dan kepatuhan normatif, tanpa menanamkan secara eksplisit sikap empatik terhadap penganut agama

¹⁹ Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta, *Potret Keberagaman Pelajar dan Radikalisme* (Jakarta: PPIM Press, 2022), 23

²⁰ Azyumardi Azra, *Islam Rahmatan lil ‘Alamin dalam Konteks Indonesia* (Jakarta: Republika, 2017), 58

²¹ Setara Institute, *Laporan Indeks Kota Toleran 2022* (Jakarta: Setara Institute for Democracy and Peace, 2022), 10

atau keyakinan lain. Studi yang dilakukan oleh Wahyudi dan Basri (2022) menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil guru Pendidikan Agama Islam yang memiliki kesadaran dan kemampuan mengintegrasikan nilai-nilai multikultural dalam pembelajaran.²²

Peter L. Berger, dalam teori sosiologisnya, menyebut bahwa dalam masyarakat modern yang majemuk, agama menjadi wilayah kompetitif yang tidak lagi taken-for-granted, tetapi dipilih dan dikonstruksi secara sadar. Ketika agama kehilangan monopoli maknanya, muncul semacam pluralisme spiritual yang justru rawan digunakan sebagai alat mobilisasi politik.²³ Berger menyoroti bahwa agama dalam masyarakat plural membutuhkan ruang untuk menyesuaikan diri, dan kegagalan dalam hal ini bisa memicu fragmentasi sosial.

Sementara itu, Clifford Geertz dalam kajiannya tentang masyarakat Jawa menjelaskan bahwa agama berperan sebagai sistem simbolik yang membentuk makna kehidupan masyarakat. Namun ketika simbol agama dilepaskan dari konteks kultural dan digunakan secara rigid atau politis, maka ia berpotensi menimbulkan disintegrasi sosial. Geertz membagi ekspresi keagamaan menjadi tiga varian: abangan, santri, dan priyayi—yang menggambarkan betapa kompleksnya identitas keagamaan dalam masyarakat lokal.²⁴ Krisis keberagaman terjadi ketika satu varian mencoba mendominasi dan menegasikan yang lain, bukan ketika perbedaan itu hadir.

Oleh karena itu, krisis keberagaman bukan semata disebabkan oleh perbedaan, tetapi oleh gagalnya manajemen perbedaan dalam kerangka pendidikan, budaya, dan kebijakan publik. Untuk itu, pendidikan Islam yang multikultural diperlukan untuk mengembangkan bukan hanya pengetahuan keagamaan, tetapi juga kebajikan sosial seperti empati, kesetaraan, dan penghargaan terhadap keragaman

4. Pendidikan Islam Multikultural sebagai Solusi Kontekstual

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural dan kerap dilanda konflik identitas serta eksklusivisme ideologis, pendidikan Islam multikultural hadir sebagai pendekatan kontekstual yang menawarkan jalan tengah antara kesalehan ritual dan keterbukaan sosial. Pendidikan ini merupakan pendekatan pedagogis yang memadukan prinsip-prinsip ajaran Islam dengan nilai-nilai multikulturalisme, dengan tujuan utama membentuk peserta didik yang tidak hanya taat secara teologis, tetapi juga memiliki etos keberagaman yang inklusif, toleran, dan mampu hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat majemuk.

Menurut James A. Banks, pendidikan multikultural adalah proses transformasi sistem pendidikan agar mencerminkan keberagaman ras, etnis, agama, dan budaya. Transformasi ini meliputi lima

²² A. Wahyudi and H. Basri, "Living Values dalam Pendidikan Agama Islam: Studi pada Madrasah Negeri," *Dialogia: Islamic Studies and Social Journal* 10, no. 1 (2022): 64–78, <https://doi.org/10.21093/di.v10i1.4532>

²³ Peter L. Berger, *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion* (New York: Anchor Books, 1990), 137

²⁴ Clifford Geertz, *The Religion of Java* (Chicago: The University of Chicago Press, 1960), 13

dimensi utama: integrasi konten pembelajaran, konstruksi pengetahuan yang reflektif, pengurangan prasangka, pendekatan pedagogis yang adil, dan penciptaan budaya sekolah yang inklusif.²⁵ Dalam perspektif Islam, kelima dimensi ini sangat relevan dengan nilai-nilai seperti rahmatan lil ‘alamin, ‘adl (keadilan), ukhuwwah insaniyyah (persaudaraan kemanusiaan), dan tasāmuh (toleransi).²⁶ Al-Qur’an secara eksplisit menegaskan bahwa keberagaman adalah sunnatullah, sebagaimana dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 yang menyebutkan bahwa perbedaan bangsa dan suku diciptakan agar manusia saling mengenal, bukan saling meniadakan.

Keselarasan antara pendekatan multikultural dan ajaran Islam juga terlihat dalam kerangka maqāṣid al-syarī‘ah yang menekankan pada tujuan-tujuan esensial dari hukum Islam. Pendidikan Islam multikultural sangat relevan dalam konteks ini, terutama pada tiga maqāṣid utama. Pertama, ḥifẓ al-dīn (menjaga agama) bukan hanya menjaga ajaran dari penyimpangan, tetapi juga dari tafsir sempit dan ekstrem yang memicu kekerasan atau eksklusivisme. Kedua, ḥifẓ al-‘aql (menjaga akal) berkaitan erat dengan pentingnya pembelajaran yang kritis dan rasional, agar peserta didik mampu memahami perbedaan secara objektif dan konstruktif. Ketiga, ḥifẓ al-‘ird (menjaga kehormatan) menunjukkan bahwa menghargai identitas dan martabat setiap manusia, termasuk perbedaan budaya dan agama, adalah bagian dari nilai inti Islam.²⁷

Implementasi pendidikan Islam multikultural dalam kurikulum pendidikan nasional dan keislaman dapat dilakukan melalui beberapa strategi praktis. Pertama, integrasi nilai toleransi, keadilan, dan kesetaraan ke dalam mata pelajaran seperti PAI, SKI, dan Pendidikan Kewarganegaraan. Kedua, pengembangan materi berbasis dialog antarbudaya, misalnya melalui studi kasus lintas agama, narasi keragaman Islam Nusantara, dan refleksi kehidupan sosial siswa. Ketiga, penerapan metode pembelajaran partisipatif dan reflektif, yang membuka ruang diskusi isu-isu aktual seperti diskriminasi, konflik identitas, dan moderasi beragama. Sebagaimana ditunjukkan oleh Mahfud (2019), sekolah atau madrasah yang mengadopsi pendekatan ini secara konsisten cenderung memiliki iklim belajar yang lebih damai dan siswa yang lebih terbuka terhadap perbedaan.²⁸

Sejumlah praktik baik dari lembaga pendidikan Islam di Indonesia telah menjadi bukti konkret bahwa pendekatan ini bukanlah utopia, tetapi sangat mungkin diterapkan. Di tingkat pesantren, misalnya, Pesantren An-Najah Jakarta mengembangkan program Pesantren Damai, yang memfasilitasi santri berdialog langsung dengan komunitas lintas iman serta mempelajari Islam melalui perspektif sosial dan multikultural. Kurikulumnya secara sadar dirancang agar menumbuhkan kesadaran damai

²⁵ James A. Banks, *Cultural Diversity and Education: Foundations, Curriculum, and Teaching*, 5th ed. (Boston: Pearson Education, 2006), 3

²⁶ M. Amin Abdullah, *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 202

²⁷ Ahmad al-Raisuni, *Naẓariyyat al-Maqasid ‘inda al-Imam al-Sbatibi* (Beirut: Dar al-Nafa’is, 2006), 117

²⁸ Choirul Mahfud, “Islamic Multicultural Education in Indonesia: Theoretical Framework and Practices,” *Journal of Social Studies Education Research* 10, no. 2 (2019): 76–89, <https://doi.org/10.17499/jsser.53102>

dan tanggung jawab sosial pada santri.²⁹ Di lingkungan pendidikan tinggi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dikenal luas dengan pendekatan integratif antara keilmuan keislaman dan nilai-nilai multikulturalisme. Melalui program Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS), UIN Kijaga aktif memfasilitasi dialog lintas agama dan mata kuliah seperti “Islam dan Pluralitas” sebagai bagian dari kurikulum yang membentuk watak akademik yang terbuka.³⁰

Sementara itu, di jenjang pendidikan menengah, MAN 3 Malang menerapkan modul Moderasi Beragama dalam pembelajaran berbasis proyek. Modul ini memasukkan unsur nilai inklusi, toleransi, serta kesadaran terhadap etika digital dalam menghadapi perbedaan keyakinan di ruang daring. Semua praktik ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam multikultural bukan sekadar teori pedagogis, tetapi sudah menjadi model pendidikan yang hidup dan terus berkembang, sesuai dengan kebutuhan zaman dan karakter masyarakat Indonesia yang plural.

Maka, pendidikan Islam multikultural tidak hanya mampu menjawab tantangan ideologi eksklusif seperti khilafahisme atau radikalisme identitas, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat yang adil, damai, dan berperadaban. Ketika nilai-nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin diinternalisasikan bersama nilai-nilai multikulturalisme, maka akan lahir generasi Muslim yang tangguh dalam iman, terbuka dalam pergaulan, dan bijaksana dalam menyikapi perbedaan.

KESIMPULAN/CONCLUSION

Artikel ini menunjukkan bahwa globalisasi, meskipun membuka ruang interkoneksi budaya dan pertukaran pengetahuan, juga membawa risiko homogenisasi nilai yang melemahkan identitas lokal dan pluralitas. Dalam konteks Indonesia, hal ini diperparah oleh menguatnya ideologi transnasional seperti khilafahisme, yang tidak hanya anti terhadap sistem nation-state dan demokrasi, tetapi juga menolak keberagaman budaya yang menjadi fondasi NKRI. Ideologi ini menyebar melalui media sosial dan pendidikan informal, dengan tingkat penerimaan yang cukup tinggi di kalangan pelajar dan mahasiswa.

Fenomena ini mencerminkan krisis keberagaman dan disorientasi identitas generasi muda. Oleh karena itu, pendidikan Islam multikultural menjadi jawaban yang relevan dan kontekstual untuk merespons tantangan tersebut. Pendidikan ini berpijak pada nilai-nilai dasar Islam yang inklusif seperti keadilan, toleransi, dan Rahmah serta didukung oleh kerangka maqāṣid al-syarī‘ah yang dinamis. Implementasi konkret telah dilakukan oleh sejumlah pesantren, madrasah, dan kampus Islam, yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai multikulturalisme ke dalam kurikulum dan budaya pendidikan mereka

²⁹ Muhammad Nurcholish, “Pendidikan Islam Multikultural di Pondok Pesantren An-Najah Jakarta,” *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 1 (2021): 45–58, <https://doi.org/10.24042/atipi.v12i1.8976>

³⁰ Abdurrahman Wahid, “Islamic Higher Education and the Challenge of Multiculturalism: The Experience of UIN Sunan Kalijaga,” *Studia Islamika* 24, no. 1 (2017): 1–31, <https://doi.org/10.15408/sdi.v24i1.4184>

DAFTAR PUSTAKA/REFERENCES

- Abdullah, M. A. (2019). *Islam sebagai ilmu: Epistemologi, metodologi dan etika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azra, A. (2000). *Islam substantif: Agar umat tidak jadi buih*. Bandung: Mizan.
- Azra, A. (2017). *Islam rahmatan lil 'alamin dalam konteks Indonesia*. Jakarta: Republika.
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (2023). *Laporan tahunan pencegahan paham radikal di lingkungan pendidikan*. Jakarta: BNPT.
- Banks, James A. (2006). *Cultural Diversity and Education: Foundations, Curriculum, and Teaching*, 5th ed. Boston: Pearson Education.
- Berger, Peter L. (1990). *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion*. New York: Anchor Books.
- Creswell, John W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 3rd ed. Los Angeles: SAGE.
- Geertz, C. (1960). *The religion of Java*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Hasan, N. (2018). *Islamic populism in Indonesia and the Middle East: Trajectories of global Islamism*. Singapore: NUS Press.
- Heryanto, A. (2008). *Popular culture in Indonesia: Fluid identities in post-authoritarian politics*. London: Routledge.
- Hizbut Tahrir Indonesia. (2013). *Khilafah: Sistem pemerintahan Islam*. Jakarta: HTI Press.
- Krippendorff, K. (2004). *Content analysis: An introduction to its methodology*. Thousand Oaks: SAGE.
- Mahfud, C. (2019). *Islamic multicultural education in Indonesia: Theoretical framework and practices*. Journal of Social Studies Education Research, 10(2), 76–89. <https://doi.org/10.17499/jsser.53102>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurcholish, Muhammad. "Pendidikan Islam Multikultural di Pondok Pesantren An-Najah Jakarta," *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 1 (2021): 45–58, <https://doi.org/10.24042/atjpi.v12i1.8976>
- Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta. (2022). *Potret keberagaman pelajar dan radikalisme*. Jakarta: PPIM Press.
- Raisuni, A. (2006). *Nazariyyat al-Maqasid 'inda al-Imam al-Sbatibi*. Beirut: Dar al-Nafa'is.
- Robertson, R. (1992). *Globalization: Social theory and global culture*. London: Sage Publications.
- Schiller, H. I. (1976). *Communication and cultural domination*. New York: M.E. Sharpe.
- Setara Institute for Democracy and Peace. (2022). *Laporan Indeks Kota Toleran*. Jakarta: Setara Institute.
- Spring, J. (2009). *Globalization of education: An introduction*. New York: Routledge.
- Wahid, A. (2017). *Islamic higher education and the challenge of multiculturalism: The experience of UIN Sunan Kalijaga*. Studia Islamika, 24(1), 1–31. <https://doi.org/10.15408/sdi.v24i1.4184>

- Wahyudi, A., & Basri, H. (2022). *Living values dalam pendidikan agama Islam: Studi pada madrasah negeri*. *Dialogia: Islamic Studies and Social Journal*, 10(1), 64–78. <https://doi.org/10.21093/di.v10i1.4532>
- Zarkasyi, H. F. (2013). *Gerakan Islam transnasional dan masa depan demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Center for the Study of Islam and Democracy (CIDES).
- Zed, M. (2004). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.